KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH** **BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM**	**NOMOR SOP**	W.17-OT.02.02-97
	TANGGAL PEMBUATAN	2026-08-28
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	2026-08-28
	DISAHKAN OLEH **Kepala Kantor Wilayah** **Hajrianor**	
	NAMA SOP	**SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Hukum	1. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya 2. Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas, Arsiparis, Pranata Komputer 3. Memiliki keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta mempu berkomunikasi dengan baik
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Layanan Permintaan Informasi Publik 2. SOP Pengelolaan Atas Keberatan Informasi 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 4. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	1. Komputer/Laptop 2. Akses internet 3. Printer, Scanner 4. Formulir Keberatan Informasi Publik 5. ATK
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengganggu tugas dan fungsi pelayanan informasi publik	Disimpan dalam bentuk data elektronik dan fisik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verify

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		ATASAN PPID	PPID	PPID PELAKSANA SATKER	KOMISI INFORMASI	PEMOHON	PTUN/PN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima surat panggilan sidang dan menginstruksikan PPID dan/atau PPID Pelaksana Satuan Kerja untuk melakukan penelaahan atas materi sengketa serta menetapkan Surat Kuasa menghadiri sidang penyelesaian sengketa	Text						1. Surat panggilan sidang 2. Berkas/materi keberatan/sengketa informasi	1 hari kerja	1. Disposisi 2. Surat Kuasa 3. Materi sidang	
2	Tim yang ditunjuk dalam Surat Kuasa menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi							1. Surat Kuasa 2. Materi sidang	tentatif	Hasil Putusan Sidang	
3	Menetapkan Putusan Sengketa Informasi Publik							Hasil Putusan Sidang	tentatif	Hasil Putusan Sidang	
4	Mengajukan banding ke pengadilan	YA	TIDAK			YA	TIDAK	Salinan Putusan Sidang	1 hari kerja	Salinan Putusan Sidang	
5	Menerima salinan Putusan Sengketa Informasi Publik	Text					Text	Salinan Putusan Sidang	tentatif	Penetapan eksekusi	